



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/954/ HK / 410.010.2 / 2015

TENTANG

PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KOTA BLITAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- b. bahwa dari beberapa konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari hasil Asistensi SAKIP maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota dan Indikator Kinerja Utama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 3. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 ;

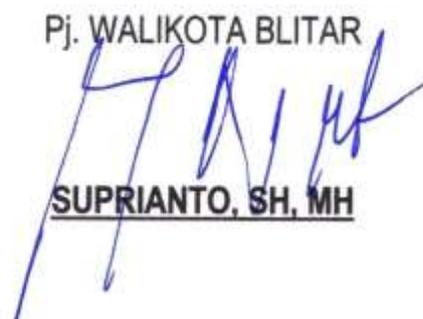
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah
 - b. perencanaan tahunan ;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja ;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja ;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/410.010.2/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 21 September 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR

SUPRIANTO, SH, MH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**PEMERINTAH KOTA BLITAR**

I VISI : MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015

- II MISI :
1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan BerkeTuhanan Yang Maha Esa
 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata
 4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
 5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Semangat Nasionalisme, Pelestarian dan Pengembangan Nilai Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal	Jumlah even budaya khas Kota Blitar	Capaian jumlah even budaya pada tahun tertentu	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Pelaksanaan Even Budaya
		Tingkat partisipasi politik (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang aktif dalam pemilu/pilkada pada tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang wajib mengikuti pemilu/pilkada pada tahun bersangkutan}} \times 100 \%$	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan hasil pemilih aktif dan pasif pada proses pemilu /pilkada
2.	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan	Prosentase lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain	$\frac{\text{Jumlah lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an/ rekomendasi dari pemuka agama}}{\text{Jumlah peserta lulusan yang ikut seleksi}} \times 100\%$	- Dinas Pendidikan - Bagian Kesra Setda - Kemenag Kota Blitar - Bakesbangpol dan	- Hasil test - Data Uji Kemampuan Agama

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Rasio tempat ibadah dibanding jumlah penduduk	Jumlah tempat ibadah ----- Jumlah penduduk	Penanggulangan Bencana Daerah	- Data Tempat Ibadah Kota Blitar - Data Bimas (Kemenag)
		Konflik karena agama	Jumlah konflik karena agama		- Data program dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
3.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan, kenyamanan)	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	- Satuan polisi pamong praja dan Kecamatan dan Kelurahan	Data Wilayah Kota Blitar
		Prosentase poskamling aktif	Jumlah poskamling aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh poskamling		Data poskamling pada masing-masing kelurahan dan kecamatan
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	Prosentase guru berkualitas S-1/D-4	Jumlah guru berkualitas S-1/D-4 ----- x 100% Jumlah Guru	Dinas Pendidikan	Dapodik
		Rasio Guru dan murid	Jumlah Guru dibandingkan dengan jumlah murid		Dapodik
		Rata-rata jumlah murid dalam 1 rombel	Jumlah murid dalam suatu sekolah ----- Jumlah rombel yang ada		Dapodik
		Prosentase kelulusan Ujian Nasional	Jumlah siswa yang lulus pendidikan dasar dan menengah dibagi jumlah siswa yang mengikuti UN dikalikan 100 %		Data Ujian Nasional

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Rata-rata nilai ujian nasional	Jumlah nilai ujian nasional semua siswa dibagi jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional		Data Ujian Nasional
5.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi murni	Jumlah siswa kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan		BPS/ Dispendukcapil
		Angka putus sekolah	Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat pendidikan dibanding jumlah siswa ditingkat pendidikan tersebut		- IPM Kota Blitar - Profil Pendidik
6.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf (%)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100%		- IPM Kota Blitar - Profil Pendidik
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Jumlah Seluruh Tahun Pendidikan Penduduk Usia I5 Tahun ke atas ----- Jumlah Seluruh Penduduk Usia I5 Tahun ke atas		Dapodik
7.	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Rasio posyandu balita per RW	Jumlah posyandu balita dibandingkan dengan jumlah RW	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo	Laporan program seksi promosi kesehatan, sistem informasi dan perijinan kesehatan Dinkes
		Rasio posyandu lansia per kelurahan	Jumlah posyandu lansia dibandingkan dengan jumlah kelurahan		Laporan program seksi promosi kesehatan, sistem informasi dan perijinan kesehatan Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)	Jumlah masyarakat miskin pemegang jamkesmas/ jamkesda dibandingkan jumlah masyarakat miskin dikalikan 100%		Laporan program seksi pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan Dinkes

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	Jumlah tenaga medis X 100.000 dibagi jumlah penduduk		Data tenaga medis pada Dinkes dan data penduduk pada Dispendukcapil
8	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup	Rata-rata tahun hidup dijalani yang berhasil mencapai umur x		Data Proyeksi Dinkes dan BPS
Prevalensi balita gizi kurang (%)		Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%	Laporan program seksi kesehatan anak, remaja, usia lanjut dan gizi masyarakat pada Dinkes		
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup		Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama kali 1.000	Laporan program seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes		
Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup		Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Laporan program seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes		
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 100.000	Laporan program seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes		

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan dikalikan 100%	- Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	- Data Jalan Kota Blitar - Kota Blitar dalam Angka
		Prosentase panjang jalan yang diterangi PJU	Panjang jalan yang diterangi PJU dibagi panjang jalan dikalikan 100%	- Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar	- Data jalan dan PJU Kota Blitar - Kota Blitar dalam Angka
		Prosentase jaringan irigasi terhadap luas lahan baku sawah	Luas lahan baku sawah yang terjangkau irigasi dibagi jumlah seluruh luas lahan baku sawah dikalikan 100%		- Data jaringan irigasi dan luas lahan baku sawah Kota Blitar (Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan) - Kota Blitar dalam Angka
10.	Meningkatnya usaha ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan PDRB	PDRB tahun t dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya	- BAPPEDA - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindustrian dan perdagangan	Data Statistik Kota Blitar
		Prosentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100% Jumlah Koperasi		Buku Profil Koperasi Kota Blitar
11.	Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Prosentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin tahun 2015 dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2015 dikali 100%	- Dinas sosial dan tenaga kerja - Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BPS

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		IPM	Rata-rata dari jumlah Angka Harapan Hidup ditambah (2/3 Angka Melek Huruf + 1/3 rata-rata lama sekolah) ditambah Indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - BPS - Angka Harapan hidup - Angka Melek huruf - Rata-rata lama sekolah - Indeks konsumsi perkapita
12.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah	Jumlah pegawai perempuan dalam lembaga pemerintah dibagi jumlah seluruh pegawai dikalikan 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Bapemas dan KB - Dinas Kependudukan dan Pencapil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data program pemberdayaan perempuan - Data penduduk perempuan
		Jumlah LPMK aktif	Capaian LPMK aktif dalam tahun tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data LPMK
13.	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP	Jumlah penduduk berKTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dispendukcapil - Inspektorat - Seluruh SKPD - Dinas Perhubungan dan Kominfo - Bagian Ortala 	Data Proyeksi Penduduk
		Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan predikat baik	Jumlah SKPD yang menerapkan SAKIP dengan nilai Baik di bagi jumlah SKPD dikalikan 100%		LHE AKIP SKPD oleh Inspektorat Kota Blitar
		Prosentase lembaga pelayanan publik yang mempunyai SPP	Jumlah SKPD pelayanan publik yang menerapkan SPP dibagi jumlah SKPD pelayanan publik dikalikan 100%		<ul style="list-style-type: none"> - Data SPP di lingkungan Pemkot Blitar - Data SKPD pelayanan publik

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Prosentase volume sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah volume sampah dikalikan 100%	- BLH - Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan	Data Tahunan Bidang Lingkungan Hidup
		Prosentase RTH Publik	Jumlah RTH publik dibagi jumlah lahan dikalikan 100%		Data Kota Blitar dalam Angka

Pj. WALIKOTA BLITAR

SUPRIANTO, S.H.,M.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Terwujudnya pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung oleh APBD Pro Rakyat
- III MISI :
 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sanitasi / kesehatan masyarakat
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana
 4. Meningkatkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat
 5. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat / lembaga masyarakat / komunitas
 6. Meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan aparatur pemerintah kelurahan yang professional serta berorientasi pada pelayanan prima
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
 2. Terwujudnya perilaku dan pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kuantitas / kualitas sumber daya alam dalam kehidupan masyarakat
 3. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
 4. Terwujudnya kegiatan musyawarah pembangunan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 5. Mewujudkan peningkatan masyarakat dalam Partisipasi Politik Masyarakat dan Peningkatan Kuantitas dan kualitas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Pemahaman dan Pengalaman Nilai Luhur Bangsa serta pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penataan system administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan kualitas data, informasi kependudukan dengan pelayanan prima kepada masyarakat dan

didukung apatur yang berkualitas

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

VI FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan

17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN TANGGUNG KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Mewujudkan Kelurahan Tanggung yang professional dalam memberdayakan dan melayani masyarakat
- III MISI :
 1. Terbebasnya masyarakat dari buta aksara dan semua anak usia 7-15 tahun mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berbasis Iptek dan Imtaq;
 2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan non formal berbasis kompetensi;
 3. Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang murah dan terjangkau;
 4. Perluasan kesempatan berusaha bagi usaha mikro dan usaha rumah tangga;
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pembangunan;
 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulial, berbudaya dan Taat Hukum;
 7. Terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
 8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya local
 9. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.
- IV TUJUAN :
 1. Mewujudkan masyarakat yang bebas buta aksara ;
 2. Mewujudkan Pendidikan dan Pelatihan non formal yang berbasis kompetensi ;
 3. Mewujudkan perluasan akses masyarakat miskin terhadap
 4. Mewujudkan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha mikro dan usuha rumah tangga
 5. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kebijakan pembangunan
 6. Mewujudkan kualitas SDM yang handal, berakhlak mulia dan taat hokum
 7. Mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik

8. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan seni budaya local
9. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman

V TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub*

domain website Pemerintah Daerah;

16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN KEPANJENKIDUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Kelurahan Professional 2015
- III MISI :
 1. Memberikan pelayanan prima melalui kontrak pelayanan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai;
 2. Meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kepanjenkidul melalui pelibatan partisipasi masyarakat di segala sector;
 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas didukung adanya lingkungan sosial yang kondusif bagi kehidupan masyarakat;
 5. Memberikan pelayanan prima melalui kontrak pelayanan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam penerapan pelayanan prima
 2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan di kelurahan
 3. Meningkatkan kualitas kinerja kelurahan melalui laporan capaian kinerja SKPD
 4. Meningkatkan hubungan antara perangkat kelurahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan
 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan
 7. Meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam penerapan pelayanan prima
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK : urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN KEPANJENLOR KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat kelurahan kepanjenlor guna mewujudkan kota blitar pro rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur bangsa
- III MISI :
 1. Memberikan pelayanan prima melalui kontrak pelayanan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai
 2. Meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kepanjenlor melalui pembangunan partisipasi masyarakat di segala sector
 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas didukung adanya lingkungan sosial yang kondusif bagi kehidupan masyarakat.
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan
 2. Meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam penerapan Citizen Carter
 3. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan di kelurahan
 4. Meningkatkan kualitas kinerja Kelurahan melalui laporan capaian kinerja SKPD
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 6. Meningkatkan hubungan antara perangkat kelurahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan
 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 8. Meningkatkan dampak positif adanya poskamling dan linmas di wilayah
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK : pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN PLOSOKEREP KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : Profesional dan Peka dalam Pelayanan untuk Mensukseskan APBD Pro Rakyat
- III MISI : 1. Peningkatan sumber daya / aparatur yang profesional, trampil, terbuka , inovatif, peduli, berakhlak dan amanah
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktiftas aparatur (sistem)
3. Mendorong timbulnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat
4. Menciptakan kondisi dinamis dan kondusif
- IV TUJUAN : 1.
2.
3.
4.
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan
POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan,

- pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : Melalui APBD Pro Rakyat Kelurahan Rembang menjadi Kelurahan yang berkualitas dan menuju masyarakat sejahtera tanggap dan tangguh
- III MISI :
1. Peningkatan kualitas pelayanan prima
2. Mewujudkan sistim pemerintahan yang demokratis
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif
4. Memberdayakan kelompok pelaku budaya
5. Menggerakkan organisasi kepemudaan Mengembangkan tanaman obat keluarga
6. Mengembangkan tanaman obat keluarga
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan
8. Program pengentasan kemiskinan
- IV TUJUAN
1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
2. Mewujudkan ketersediaan aparatur yang berkualitas
3. Mewujudkan kualitas pelayanan prima
4. Mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
5. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah kecamatan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dasar
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan
7. Mewujudkan potensi sumber daya wilayah sebagai modal pembangunan
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : KELURAHAN PRIMA BERDAYA PADA TAHUN 2015
- III MISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan perangkat kelurahan yang berkompeten
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelurahan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari semua lapisan dan golongan sebagai mitra kerja kelurahan dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif dan pembangunan yang berkelanjutan
- IV TUJUAN : 1. Optimalisasi fungsi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kelurahan ;
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan melalui dokumen-dokumen pendukung pencapaian kinerja SKPD ;
4. Meningkatkan ketersediaan data potensi kelurahan ;
5. Meningkatkan kerjasama antara perangkat kelurahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta para pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penguatan sistem keamanan lingkungan dan pembinaan politik masyarakat;
8. Meningkatkan upaya pelestarian Sumber Daya Alam
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

I INSTANSI : KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN

II VISI :

III MISI : 1.
2.
3.
4.

IV TUJUAN : 1.
2.
3.
4.

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

- pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN GEDOG KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : Mewujudkan Kelurahan yang memberikan Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang ditunjang pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2015
- III MISI :
1. Memperkuat manajemen pemerintahan kelurahan menuju peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi lingkungan yang kondusif
3. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional sesuai dengan karakter dan kearifan lokal
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
5. Meningkatkan kawasan ramah lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam
- IV TUJUAN :
1. Menciptakan tata pemerintahan yang reponsif, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Menjaga pelestarian budaya dan seni tradisional sesuai dengan karakter Kelurahan Gedog
4. Mewujudkan dan meningkatkan sistem manajemen pembangunan partisipatif menuju masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;

3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : Terwujudnya Kelurahan Bendogerit Yang Sehat, Asri, Aman dan Mengutamakan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera
- III MISI :
1. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat dan asri
2. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman tentram tertib dan kondusif
3. Mewujudkan pengelolaan data yang baik dan menerapkan pelayanan prima
4. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal
- IV TUJUAN : 1. Dibentuknya Kelurahan bertujuan sebagai pintu pertama Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada warga Kota Blitar
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan
POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN BENDO KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Mewujudkan Pelayanan yang Profesional dan Pemberdayaan Menuju Masyarakat yang Sejahtera
- III MISI :
1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui pembangunan partisipasi masyarakat
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, budaya, seni tradisional dan adat istiadat
5. Menciptakan pertumbuhan perekonomian masyarakat
- IV TUJUAN :
1. Terciptanya pelayanan yang responsif, transparan dan akuntabel
2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparat kelurahan
4. Penyedia data yang cepat, tepat dan akurat
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan
6. Meningkatnya hubungan antara perangkat kelurahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah dalam hubungan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara
8. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian SDA, budaya, seni tradisional dan adat istiadat
9. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan
POKOK : pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

I INSTANSI : KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KEPANJENKIDUL

II VISI :

III MISI : 1.
2.
3.
4.

IV TUJUAN : 1.
2.
3.
4.

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

- pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

I INSTANSI : KELURAHAN SENTUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL

II VISI :

III MISI : 1.
2.
3.
4.

IV TUJUAN : 1.
2.
3.
4.

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

- pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN TANJUNGSARI KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Terwujudnya Kelurahan Tanjungsari yang aspiratif, partisipatif dalam kerangka menuju kawasan yang berkembang dibidang Pemerintahan, Pelayanan Prima Masyarakat, Pemukiman, Pertanian,Perdagangan barang dan jasa menuju masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan dan berakhlak.
- III MISI :
1. Meningkatkan pelayanan prima untuk membangun citra kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintahan dan sebagai Pelayan masyarakat
2. Minkatkan pembangunan yang partisipatif dilandasi sikap aspiratif
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pengembangan Home Industri dan UKM
5. Pengembangan pemukiman berlasdaskan Tata Ruang Wilayah dengan dasar Pelestarian lingkungan
6. Pelestarian Pengembangan budaya local
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kelurahan
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mewujudkan kemandirian Masyarakat dalam pengembangan home industry dan UKM
5. Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
6. Meningkatkan semangat Nasionalisme pelestarian dan pengembangan nilai sejarah budaya dan kearifan lokal
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;

2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Terciptanya Kawasan Agrowisata dan Home Industri Yang Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat
- III MISI :
1. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.
2. Mendorong meningkatnya perekonomian kemandirian masyarakat dalam pengembangan sentral kawasan home industri
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana instruktur
4. Terciptanya kawasan ekonomi agrowisata sebagai pusat penguatan ekonomi kerakyatan
- IV TUJUAN :
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang reponsif, akuntabel, transparan dan didukung aparaturnya yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat
3. Mewujudkan situasi yang aman dan kondusif
4. Meningkatkan semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan local
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;

6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN TLUMPU KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Berkreativitas Dan Berinovasi Guna Menciptakan Kondisi Yang Kondusif Dalam Memberdayakan, Melayani Dan Membangun Masyarakat
- III MISI :
1. Meningkatkan pelayanan politik publik melalui peningkatan SDM aparatur dan manajemen pemerintahan
2. Meningkatkan SDM masyarakat yang sehat dan terampil dalam menciptakan peluang usaha bagi peningkatan kesejahteraan
3. Melestarika seni budaya dan adat tradisional yang dilandasi semangat gotong royong dan kerukunan
4. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan hasil pembangunan
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kelurahan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- V TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;

8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Mewujudkan masyarakat Kelurahan Kauman yang relegius dan terpenuhi kebutuhan dasarnya
- III MISI :
 1. Mewujudkan pelayanan prima yang didukung dengan aparat dan sarana prasarana yang memadai
 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang transparan dan akuntabel
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kauman melalui pembangunan partisipasi masyarakat di segala sektor
 4. Mewujudkan masyarakat Kelurahan yang agamis dan kondusif
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan;
 2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan di kelurahan;
 3. Meningkatkan kualitas kinerja SKPD
 4. Meningkatkan hubungan antara perangkat kelurahan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
 2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
 3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
 6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah

7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN PAKUNDEN KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Mewujudkan Kelurahan yang memberikan Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang ditunjang pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2015
- III MISI :
1. Memperkuat manajemen pemerintahan kelurahan menuju peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi lingkungan yang kondusif
3. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional sesuai dengan karakter dan kearifan lokal
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
5. Meningkatkan kawasan ramah lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam
- IV TUJUAN :
1.
2.
3.
4.
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;

6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN BLITAR KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat untuk mencapai masyarakat yang berdaya, sejahtera dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
- III MISI :
1. Pengelolaan dan penatausahaan pemerintahan kelurahan yang tertib dan akuntabel
2. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat ;
3. Menumbuhkembangkan karakter berdaya , mandiri , partisipatif dan religius kepada masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan seni budaya ;
4. Menciptakan kawasan kelurahan yang asri, sehat dan produktif .
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
2. Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui nilai-nilai budaya dan seni;
- V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah

7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

I INSTANSI : KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO

II VISI :

III MISI : 1.
2.
3.
4.

IV TUJUAN : 1.
2.
3.
4.

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

- pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Lurah	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah Usulan RW yang menjadi Prioritas}}{\text{Jumlah Seluruh Usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : INSPEKTORAT
- II VISI : Menjadikan Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan yang Profesional di Tahun 2015
- III MISI : Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel
- IV TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- V TUGAS : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas POKOK penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.
- VI FUNGSI :
 1. Perencanaan program pengawasan;
 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 5. Monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan ;
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Inspektorat ;
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme	Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B	$\frac{\text{Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B}}{\text{Jumlah SKPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	LHE SAKIP SKPD	Inspektur Pembantu
		Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100\%$	LHP Kasus	Inspektur Pembantu
		Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI}} \times 100\%$	Resume Pemantauan TLHP BPK RI	Sekretaris dan Inspektur Pembantu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS KESEHATAN
- II VISI : Menuju Masyarakat Kota Blitar Mandiri untuk hidup sehat Tahun 2015
- III MISI : 1. Mendorong terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat dalam peran serta pembangunan kesehatan
2. Mendorong terlaksananya pembangunan berwawasan kesehatan serta pencegahan, penanggulangan penyakit yang berpotensi wabah dan PD3I
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan; yang bermutu, merata, terjangkau serta berkualitas
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan
- IV TUJUAN : 1. Terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis Masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan mutu lingkungan yang lebih sehat serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan serta pencegahan, penanggulangan penyakit yang berpotensi wabah dan PD3I
3. Terwujudnya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau serta berkualitas
4. Terwujudnya peningkatan dan pendayagunaan sumberdaya kesehatan
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
POKOK
- VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan ;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;

5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan serta bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi ;
6. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan, bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya ;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
12. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian	Persentase Kelurahan Siaga Aktif	(Jumlah Kelurahan siaga yang aktif/Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk) X 100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
2.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan wabah serta PD3I	Penemuan penderita AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	(Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan/Jumlah Penduduk < 15 tahun)x 100.000	P2PL	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
3.	Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya	AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	Lap Kesga & Kespro
		AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	Lap Kesga & Kespro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		AKBAL (Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup)	(Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi + anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	Lap Kesga & Kespro
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Bidang Peningkatan Kesehatan	Data Kependudukan BPS
		Persentase pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan/RS di Kab/Kota	(Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1/Jumlah RS kab/kota) x 100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
4.	Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat	Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	(Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP - ASI/Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin)x100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
		Prevalensi Balita gizi kurang	Balita dengan status gizi berdasarkan indeks BB/U dengan Z-score <-3 SD (bb sangat kurang) dan -3 sd -2SD (bb kurang) / jumlah balita pada periode dan wilayah tertentu x 100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Gizi
		Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan	(Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama)x100%		Kinerja SPM
5.	Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat	Persentase kecukupan obat dan alat kesehatan pakai habis untuk pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan dan jaringannya	(Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah pemakaian obat/vaksin tertentu pada tahun sebelumnya di wilayah pada kurun waktu yang sama) x 100%	UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan	Laporan program pada UPTD Faralkeslab
6.	Terwujudnya pengembangan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	{Jumlah kunjungan baru maskin di sarana kesehatan strata pertama/15 % x jumlah seluruh maskin (kuota dan non kuota)di kab/kota} x 100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
		Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	{Jumlah pasien rujukan maskin di sarkes strata 2 dan strata 3/Angka rujukan (1,5 %) x jumlah masyarakat miskin} x 100%	Bidang Peningkatan Kesehatan	Laporan Capaian Indikator Kinerja SPM
7.	Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standard	Persentase kecukupan jumlah tenaga kesehatan	(Jumlah tenaga fungsional nakes yang telah di SK kan/Seluruh jumlah tenaga kesehatan) x 100%	Sekretariat	Laporan program pada Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
- II VISI : Mewujudkan pertanian yang berdaya saing ekonomi dan menunjang ketahanan pangan pada tahun 2015
- III MISI :
1. Meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian
2. Meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan
3. Meningkatkan produksi dan daya saing produk peternakan serta pengamanan Bahan Asal Hewan (BAH)
4. Meningkatkan kualitas SDM kualitas SDM petani dan aparatur pertanian
5. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan masyarakat
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama.
2. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil pertanian.
3. Meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan produksi peternakan.
5. Meningkatkan pengendalian penyakit menular ternak.
6. Meningkatkan kualitas SDM petani
7. Meningkatkan kinerja SDM Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
8. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan masyarakat
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan
POKOK berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan,

- Peternakan dan Ketahanan Pangan ;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 6. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 7. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 8. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 9. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
 10. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 11. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
 12. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;
 13. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; dan
 15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan utama	Produktivitas padi per tahun (ton/hektar)	$\frac{\text{Produksi padi selama 1 tahun (ton)}}{\text{Luas areal panen padi (hektar)}}$	Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura	Laporan produksi padi
		Produktivitas jagung per tahun (ton/hektar)	$\frac{\text{Produksi jagung selama 1 tahun (ton)}}{\text{Luas areal panen jagung (hektar)}}$	Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura	Laporan produksi jagung
		Produktivitas kacang tanah per tahun (ton/hektar)	$\frac{\text{Produksi kacang selama 1 tahun (ton)}}{\text{Luas areal panen kacang (hektar)}}$	Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura	Laporan produksi kacang
2.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Prosentase luas lahan sawah yang terjangkau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) permanen (%)	$\frac{\text{Luas lahan sawah yang terjangkau JITUT permanen (ha)}}{\text{Luas lahan baku sawah (ha)}} \times 100\%$	Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura	Data luas lahan sawah
3.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi ikan konsumsi per tahun (ton/th)	Jumlah produksi ikan konsumsi per tahun (ton/th)	Bidang Perikanan	Data produksi ikan konsumsi
		Produksi ikan hias per tahun (ekor/th)	Jumlah produksi ikan hias per tahun (ekor/th)	Bidang Perikanan	Data produksi ikan hias
		Produksi benih ikan per tahun (ekor/th)	Jumlah produksi benih ikan di BBI Kota Blitar per tahun (ekor/th)	UPTD BBI & PIAIH	Data produksi benih ikan
4.	Meningkatnya produksi peternakan	Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil peternakan per tahun (%)	$\frac{\text{Prosentase peningkatan produksi daging + susu + telur selama 1 tahun}}{16 \text{ jenis komoditas}}$	Bidang Peternakan	Laporan produksi hasil peternakan
5.	Meningkatnya daya saing produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan	Jumlah produk olahan kelompok binaan Dinas yang layak dipasarkan	Jumlah produk yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (mutu produk baik & konsisten, bersih, menggunakan kemasan sesuai standar keamanan pangan dan desain kemasan)	- Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura - Bidang	Data produk olahan hasil pertanian, perikanan dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			menarik)	Perikanan - Bidang Pernakan	peternakan
6.	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan	Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian, perikanan & peternakan unggulan per bulan	Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian, perikanan & peternakan unggulan per bulan	- Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura - Bidang Perikanan - Bidang Peternakan	Quisioner kepada kelompok binaan Dinas yang difasilitasi mengikuti event promosi
7.	Meningkatnya pengawasan mutu & keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)	Prosentase produk Rumah Potong Hewan yang mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)	Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang mendapat pemeriksaan antemortem, post mortem dan sertifikasi HALAL $\frac{\text{Jumlah hewan yang dipotong di RPH}}{\text{Jumlah hewan yang dipotong di RPH}} \times 100$	UPTD RPH	Laporan produk RPH
8.	Meningkatnya kualitas SDM petani	Prosentase petani terlatih	$\frac{\text{Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga Petani (RTP) berdasarkan hasil Sensus Pertanian}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Pangan	- Kelompok Jabatan Fungsional - Sensus Pertanian BPS
9.	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat	Prosentase rata-rata capaian indikator Nasional SPM Ketahanan Pangan	$\frac{\text{Jumlah total \% capaian indikator SPM KP Kota Blitar pada tahun 2015}}{\text{Jumlah indikator SPM KP Nasional}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Pangan	Laporan capaian kinerja indikator SPM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
- II VISI : Terwujudnya RSD Mardi Waluyo sebagai rumah sakit pilihan utama masyarakat, yang mampu bersaing di era global pada tahun 2015
- III MISI :
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat
2. Membangun citra pelayanan kesehatan yang partisipatif
3. Membangun kerjasama dengan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan pihak ketiga
4. Meningkatkan sistem manajemen rumah sakit
5. Meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan paripurna kepada masyarakat
2. Meningkatkan citra pelayanan kesehatan yang partisipatif
3. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan
4. Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan rumah sakit
5. Meningkatkan sumber daya manusia serta kesejahteraan karyawan
- V TUGAS : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna
- POKOK
- VI FUNGSI :
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

4. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan
6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.</p> <p>Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.</p>	Bagian Program dan Kepega waian	Laporan Tahunan
		Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%$ <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Turn Over Internal (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.		
		Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$ <p>BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000\%$ <p>NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000\%$ <p>GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Bagian Umum dan Humas	Humas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.</p>		
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Rumah Sakit	Cost Recovery Ratio (CRR)	$\frac{\text{Pendapatan operasional RS}}{\text{Belanja operasional RS}} \times 100\%$ <p>CRR merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Semakin tinggi nilai CRR semakin mandiri rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasional.</p>	Bagian Keuangan	Laporan Tahunan
		Persentase Jenis Pelayanan sesuai Standar Rumah Sakit kelas B	$\frac{\text{Jenis pelayanan yg ada}}{\text{Jenis pelayanan sesuai Standar RS Klas B}} \times 100\%$ <p>Jenis pelayanan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar Rumah Sakit kelas B.</p>	Bagian Program dan Kepegawaian	Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- II VISI : Terwujudnya sarana prasarana kota dan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Tahun 2015
- III MISI :
 1. Meningkatkan kualitas jalan, jaringan irigasi guna pengendalian sumber daya air untuk kelancaran pertumbuhan perkonomian rakyat.
 2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai
 3. Meningkatkan penyediaan data base yang lengkap dan akurat.
 4. Meningkatkan perwujudan tata bangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan lingkungan.
- IV TUJUAN :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan POKOK asas otonomi dan tugas pembantuan
- VI FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;
 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;

5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan Daerah ;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;
7. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya kualitas jalan dan jaringan irigasi sesuai standard	Prosentase jalan yang dilalui angkutan barang dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan yang dilalui angkutan barang dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan yang dilalui angkutan barang total}} \times 100$	Bidang Prasarana Wilayah	Data jalan
		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik}}{\text{total panjang saluran irigasi}} \times 100\%$	Bidang Prasarana Wilayah	Data jaringan irigasi
2.	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai	Prosentase berkurangnya kawasan permukiman rawan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas total kawasan permukiman rawan kumuh}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Data kawasan permukiman
3.	Terwujudnya peningkatan penyediaan data base yang lengkap dan akurat	Validitas data base yang lengkap dan akurat	$\frac{\text{Jumlah data base yang terupdate}}{\text{jumlah total database}} \times 100\%$	Bidang Bina Teknik dan Data	Database Dinas PU dan Perumahan
4.	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang}}{\text{luas total wilayah kota}} \times 100\%$	Bidang Tata Kota	- RTRW - Peta Tata Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- II VISI : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Jasa Perhubungan Serta Pemerataan Akses Data Penyebarluasan Informasi Publik yang Akomodatif dan Responsif
- III MISI :
1. Meningkatkan sistem transportasi yang handal dan responsive
2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi
3. Meningkatkan jasa perhubungan
4. Mewujudkan komunikasi dua arah Pemerintah Daerah dan masyarakat berbasis teknologi informasi.
- IV TUJUAN :
1. Meningkatnya kelancaran arus barang, jasa dan orang
2. Mewujudkan keselamatan pengguna jalan
3. Mengembangkan transportasi masal
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh akses informasi dan pelayanan publik
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
10. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan Daerah ;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
17. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meingkatnya pelayanan lalu lintas	Prosentase Tingkat kelancaran arus lalu lintas	$\frac{\text{Ruas jalan yang di} - \text{rekayasa lalu} - \text{lintas}}{\text{Ruas jalan yang di} - \text{rekayasa lalu} - \text{lintas}} \times 100$	Bidang Lalu-Lintas	Data bidang Lalu Lintas
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Prosentase Penurunan jumlah kejadian kecelakaan	$\frac{\Delta \text{ Jumlah kecelakaan tahun } (n - 1) - n}{\sum \text{ Jumlah kecelakaan tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Δ : selisih jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014-2015 \sum : Total jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014	Bidang Keselamatan jalan	Data kejadian kecelakaan
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perkotaan	Prosetase Pemenuhan kebutuhan Angkutan Perkotaan	$\frac{\text{Jumlah Penumpang}}{\text{Kapasitas Angkutan}} \times 100\%$	Bidang Terminal dan Angkutan	Data Penumpang dan Angkutan
4.	Terwujudnya keterbukaan informasi publik	Prosentase tertanganinya permintaan layanan informasi dan dokumentasi	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Informasi di PPID dan ULPIM}} \times 100\%$	Bidang Kominfo	Data Permohonan Informasi
5.	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi	Prosentase SKPD yang menggunakan TI dalam Pelayanan publik	$\frac{\text{SKPD yang memanfaatkan TI dalam Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah SKPD Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Kominfo	Data SKPD yang memanfaatkan TI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya infrastruktur perekonomian masyarakat	Presentase panjang jalan yang diterangi PJU	$\frac{\text{Panjang jalan yang diterangi PJU}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%$	Bidang Keselamatan jalan	Data panjang jalan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- II VISI : Berkembangnya IKM serta meningkatnya Iklim Perdagangan dan Pemasaran yang Kondusif di Tahun 2015
- III MISI :
 1. Meningkatnya Kegiatan Usaha Perdagangan barang dan Jasa
 2. Pemantapan Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri serta kualitas SDM
 3. Mengoptimalkan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- IV TUJUAN : 1.
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan POKOK asas otonomi dan tugas pembantuan.
- VI FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum,

- ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah;
 10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal; dan
 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan data industri (Pelaku Usaha/IKM)	Pemutakiran data Industri	Updating data Industri pada tahun berjalan	Bidang Perindustrian dan ESDM	Hasil Pemutakiran Data
2	Meningkatnya Daya Saing Industri melalui peningkatan sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan standarisasi Industri	Peningkatan PDRB Sektor Industri	PDRB Industri non migas atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan	Bidang Perindustrian dan ESDM	BPS
3	Meningkatnya Daya Saing Industri melalui peningkatan promosi produk IKM	Prosentase peningkatan Jumlah Promosi Produk IKM	Jumlah promosi tahun (n) dibagi Jumlah Promosi Tahunn (n-1) dibagi Jumlah Promosi Tahun (n-1) X 100 %	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan
		Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi HAKI	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HAKI tahun 2015 dikurangi Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HAKI tahun sebelumnya X 100 %	Bidang Promosi dan Penanaman Modal	Bidang Promosi dan Penanaman Modal
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap konsumen	Prosentase UTTP yang telah ditera dan tera ulang	Jumlah dan Jenis UTTP yang ditera dan tera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah total UTTP yang telah terdata X 100 %	Bidang Perdagangan	Data Kegiatan tera dan tera ulang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Informasi perkembangan harga kebutuhan pokok	Prosentase Peningkatan jumlah intensitas informasi harga kebutuhan bahan pokok	$\frac{\text{Jumlah Intensitas informasi harga bahan pokok tahun}(n) - \text{Jumlah Intensitas informasi harga bahan pokok tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Intensitas informasi harga bahan pokok tahun } (n-1)} \times 100 \%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- II VISI : Tertib administrasi kependudukan
- III MISI : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- IV TUJUAN : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip – prinsip ketata pemerintahan yang baik
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- VI FUNGSI :
1. Permusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan

kewenangan Daerah;

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tertib Administrasi Kependudukan	Presentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP : Jumlah penduduk wajib KTP x 100%	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data base Kependudukan
		Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan	Jumlah Data Ganda/Anomali : Jumlah penduduk x 100%	Bidang Data dan Penyuluhan	Data base Kependudukan
		Persentase Penerbitan Kutipan Akte Kematian	Jumlah Cakupan Kutipan Akte Kematian pada N-Tahun dibagi Jumlah Penduduk yang mati pada N-Tahun	Bidang Pencatatan Sipil	Data base kependudukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- II VISI : TERWUJUDNYA PARIWISATA KEBANGSAAN YANG DILANDASI BUDAYA LOKAL DENGAN DIDUKUNG PEMUDA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA DAN SENI
- III MISI :
1. Mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat;
2. Mewujudkan Generasi muda yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan;
3. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi masyarakat;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkesenian dan berkebudayaan dengan penguatan seni budaya lokal;
5. Meningkatkan pelayanankepariwisataan dan pengembangan obyek wisata dengan mengedepankan partisipasi insan pariwisata
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Dinas Porbudpar ke dalam maupun di luar Dinas
2. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan iptek dan peran serta kepemudaan
3. Meningkatkan upaya pembinaan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat untuk meraih prestasi didaerah maupun di luar daerah Kota Blitar
4. Meningkatkan upaya pelestarian sejarah dan seni budaya dan kearifan lokal
5. Meningkatkan daya tarik wisata kebangsaan Kota Blitar
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan POKOK
asas otonomi dan tugas pembantuan
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah
15. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Pariwisata; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan keperansertaan generasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase peningkatan jumlah organisasi kepemudaan	$\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan aktif Th n} - (\text{Th n-1})}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Data organisasi kepemudaan - Pembinaan kepemudaan
2.	Meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi masyarakat dalam berolahraga	Prosentase peningkatan jumlah organisasi olahraga (klub olahraga)	$\frac{\text{Jumlah organisasi olahraga aktif Th n} - (\text{Th n-1})}{\text{Jumlah organisasi olahraga Th n-1}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Data organisasi cabang olah raga - Data prestasi olah raga
3.	Melestarikan seni budaya lokal kota Blitar	Prosentase jumlah kelompok seni budaya lokal aktif tahun 2015 – 2016. Jumlah even budaya khas Kota Blitar.	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni budaya lokal}}{\text{Jumlah seluruh kelompok seni budaya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah even budaya yang digelar}}{\text{Jumlah budaya yang ada}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - data kelompok/ grup kesenian, dan sarana prasarana kesenian - data jenis budaya
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Th n} - (\text{Th n-1})}{\text{Jumlah wisatawan Th n-1}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kunjungan wisatawan 2. Data usaha jasa pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- II VISI : Terdepan dalam penegakan peraturan daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang kondusif di Kota Blitar
- III MISI : 1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan pemberdayaan masyarakat
- IV TUJUAN : 1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap norma sosial
2. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
- V TUGAS : Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- VI FUNGSI : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Blitar;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan manaati peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota;

7. Pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Prosentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan}} \times 100\%$	Kasi penegakan peraturan perundangan daerah	Data pelanggaran perda
2.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$	Kasi trantibum	Data gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3.	Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Rasio petugas linmas per RT	$\frac{\text{jumlah anggota linmas}}{\text{jumlah RT se Kota Blitar}}$	Kasi linmas	Data linmas
		Prosentase poskamling aktif	$\frac{\text{jumlah poskamling aktif}}{\text{jumlah poskamling se Kota Blitar}} \times 100\%$	Kasi trantibum	Data poskamling

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
- II VISI : Unggul dalam pemerian kualitas pelayanan dan menjunjung tinggi profesionalisme
- III MISI :
1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur
3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
5. Meningkatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Menciptakan prosedur pelayanan perizinan yang sederhana, transparan, tepat dan cermat
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan.
POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan;
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pelayanan perizinan;
8. Pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pelayanan perizinan;

9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan;
16. Pelaksanaan evaluasi dalam proses pelayanan perizinan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
17. Pelaksanaan pengelolaan website (*software aplikasi sms gateway*) untuk kemudahan/percepatan pelayanan perijinan;
18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan;
21. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Prosentase realisasi perizinan yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Izin yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perizinan yang selesai}} \times 100\%$	Kepala KP2T	Register Perijinan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
- II VISI : Sadar Arsip dan Gemar Membaca
- III MISI : 1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan kearsipan
2. Meningkatkan Upaya Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
- IV TUJUAN : 1. Mengamankan dan melestarikan dokumen/arsip daerah sebagai bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Arsip Daerah yang terintegrasi, tertib, prosedural, efektif dan efisien
3. Optimalisasi Pengelolaan Perpustakaan
4. Meningkatkan Minat Baca
5. Meningkatkan Tertib Administrasi , ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan Program
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan.
POKOK
- VI FUNGSI : 1. Penyusunan rumusan pengambilan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan;
6. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang kearsipan dan perpustakaan;
7. pembinaan sumber daya manusia, evaluasi sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dan perpustakaan;

8. pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
9. pelaksanaan pengelolaan arsip statis;
10. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif SKPD dengan retensi 10 (sepuluh tahun) atau lebih;
11. pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif SKPD dengan retensi sekurang – kurangnya 10 (sepuluh tahun) atau lebih;
12. pelaksanaan Program arsip vital;
13. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;
14. pelaksanaan sosialisasi kearsipan;
15. pengadaan, pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pengkajian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam;
16. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
17. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, buku rujukan berupa indek dan literatur sekunder lainnya;
18. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
19. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
20. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
21. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan;

26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
27. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
28. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
29. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Akuisisi, Perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/Arsip Daerah	Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah SKPD yang menerapkan Arsip secara baku $\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan Arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	Seksi Kearsipan	Laporan Hasil Monev Kearsipan
		Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip :		
			- Sosialisasi Kearsipan	Seksi Kearsipan	Laporan Hasil Sosialisasi
			- Asistensi Kearsipan	Seksi Kearsipan	Laporan Hasil Asistensi Kearsipan
2.	Terlaksananya Sinkronisasi Manajemen Kearsipan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Pemeliharaan Kearsipan	Ketersediaan Ruang Arsip di Setiap SKPD	Seksi Kearsipan	Data Ruang Arsip
			Ketersediaan Ruang Arsip di Lingkup Kota	Seksi Kearsipan	Data Ruang Arsip
			Pengelola Arsip di setiap SKPD	Seksi Kearsipan	SK.Walikota Blitar tentang Tenaga Arsip SKPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Petugas Pengelola Arsip di lingkup Kota	Seksi Kearsipan	Data pengelola arsip
3	Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada pemustaka	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Seksi Perpustakaan	Data judul buku
			Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Seksi Perpustakaan	Data koleksi buku
		Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 Tahun	Seksi Perpustakaan	Buku Sirkulasi
			Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 Tahun	Seksi Perpustakaan	Kota Blitar dalam Angka

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KANTOR PENGELOLA PASAR
- II VISI : Mewujudkan Pasar Yang Berdayasaing, Memberikan Kontribusi Bagi Pendapatan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat
- III MISI : 1. Meningkatkan daya saing pasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas , sarana dan prasarana serta optimalisasi pelayanan dan pemberdayaan pedagang pasar
2. Meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan pasar
3. Meningkatkan sistem perekonomian kerakyatan
- IV TUJUAN : 1. Mengembangkan pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pemberdayaan pedagang pasar
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan retribusi
3. Mendorong pemberdayaan pedagang berbasis ekonomi kreatif
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pasar
POKOK
- VI FUNGSI : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
5. Pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
6. Pengelolaan parkir di lingkungan pasar;
7. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar;
8. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;

9. Pemberian dan pencabutan perijinan di lingkungan pasar; pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
14. Pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar;
15. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
16. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
17. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
19. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
20. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
21. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di bidang pasar secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
22. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
23. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya daya saing pasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pasar	Prosentase jumlah pasar yang dibangun	$\frac{\text{jumlah bangunan pasar yang dibangun}}{\text{total jumlah pasar yang ada di kota blitar}} \times 100\%$	Seksi pengembangan pasar	Laporan kegiatan
2.	Meningkatnya prasarana di area pasar	Prosentase jumlah sarana prasarana di area pasar yang dibangun	$\frac{\text{jumlah prasarana di area pasar yang dibangun}}{\text{jumlah pasar yang ada di kota blitar}} \times 100\%$	Seksi pengembangan pasar	Laporan kegiatan
3.	Meningkatnya pendapatan retribusi pasar	Prosentase jumlah pendapatan retribusi pasar	$\frac{\text{jumlah penerimaan retribusi pasar}}{\text{jumlah potensi pendapatan pasar}} \times 100\%$	Seksi pemungutan retribusi	Laporan kegiatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- II VISI : Mewujudkan Kecamatan Kepanjenkidul yang profesional dalam memberdayakan dan melayani masyarakat
- III MISI :
1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat dan tepat
2. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala bidang
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
- IV TUJUAN :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga organisasi kemasyarakatan
3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif
- V TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah
POKOK kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- VI FUNGSI :
1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan ;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah

kerjanya ;

9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan	Survei IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu/Jumlah Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas	Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas / Jumlah seluruh usulan Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : PEMERINTAH KECAMATAN YANG PROFESIONAL, REPONSIF, EFEKTIF DAN INOVATIF DENGAN DIDUKUNG OLEH APBD PRO RAKYAT
- III MISI :
 1. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis dengan menerapkan prinsip dan semangat otonomi daerah yang berpihak kepada rakyat;
 2. Memperbaiki manajemen dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur ;
 3. Menerapkan prinsip dan mewujudkan kualitas pelayanan prima pemerintah kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan ;
 4. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar melalui program Pemberdayaan kelembagaan masyarakat baik formal maupun non formal dalam rangka mewujudkan jaringan kerja dan lingkungan yang kondusif ;
 5. Mengoptimalkan potensi sumber daya wilayah melalui pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
- IV TUJUAN :
 1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
 2. Mewujudkan ketersediaan aparatur yang berkualitas
 3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
 4. Mewujudkan sinergitas program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
 5. Meningkatkan upaya pelestarian sejarah dan seni budaya lokal
 6. Mewujudkan potensi sumber daya wilayah sebagai modal pembangunan
 7. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan daerah dan ekonomi

V TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- FUNGSI
1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
 2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
 6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan ;
 7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
 9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
 10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

- pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
 19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan	Survei IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu/Jumlah Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas	Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas / Jumlah seluruh usulan Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KECAMATAN SUKOREJO
- II VISI : TERWUJUDNYA KECAMATAN SUKOREJO SEBAGAI KAWASAN TUMBUH KEMBANG YANG BERBASIS KOMUNITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
- III MISI : 1. Memperkuat manajemen pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan menuju peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- IV TUJUAN : 1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dalam menjalankan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan kontrak pelayanan (Citizen Charter) kepada masyarakat
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal dengan peningkatan kualitas dan produktifitas produk unggulan kelurahan
4. Menjaga pelestarian budaya dan seni tradisional sesuai dengan karakter masing-masing Kelurahan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung bagi perkembangan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat
6. Mewujudkan dan meningkatkan sistem manajemen pembangunan partisipatif menuju masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam

- V TUGAS : Menyenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
 2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
 6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan
 7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
 8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
 9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
 10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

- pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
 19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan	Survei IKM	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey IKM
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu/Jumlah Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang
		Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas	Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas / Jumlah seluruh usulan Kelurahan x 100%	Camat	Laporan Hasil Musrenbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
- II VISI : MENJADI DAYA DUKUNG UTAMA DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG PRO RAKYAT
- III MISI : 1. Mewujudkan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dalam bidang tata kelola pemerintahan, hukum dan ketatalaksanaan
2. Mewujudkan perumusan kebijakan ekonomi kerakyatan dan pengendalian pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memantapkan tertib administrasi penatausahaan barang daerah, kehumasan dan keprotokolan
- IV TUJUAN : 1. Meningkatnya koordinasi dalam rangka peningkatan supremasi hukum di daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Aparatur Yang Bersih dan Baik (Good and Clean Government)
3. Meningkatnya kualitas Sistem Pelayanan Publik yang responsif terhadap tuntutan perubahan seiring perkembangan teknologi dan informasi
4. Meningkatnya kualitas kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pengembangan organisasi dan sistem ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dan pembinaan administrasi pemerintah daerah
5. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat
6. Meningkatnya sistem fasilitasi koordinasi, evaluasi dan pembinaan administrasi aparatur Daerah, administrasi keuangan Daerah, administrasi perlengkapan, dan rumah tangga daerah, keprotokolan
- V TUGAS : Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi
- POKOK

- VI FUNGSI : 1. Penyusunan, penetapan dan fasilitasi penerapan kebijakan pemerintah daerah ;
2. Pengoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah serta lembaga pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kota Blitar	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kemendagri	Bagian Tata Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri RI
		Persentase pemrosesan pensertifikatan tanah pemerintah daerah yang tepat waktu	(Jumlah pemrosesan pensertifikatan tanah pemerintah daerah dan tanah masyarakat yang tepat waktu / Jumlah pensertifikatan tanah) x 100%	Bagian Tata Pemerintahan	Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar
		Presentase LPMK Aktif	(Jumlah LPMK yang berperan aktif dalam kegiatan Pemerintah / Jumlah LPMK se Kota Blitar) x 100 %	Bagian Tata Pemerintahan	Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Blitar
2.	Terbentuknya Produk Hukum Kota Blitar yang berkualitas	Presentase Perda yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Raperda dalam prolegda}} \times 100\%$	Sub bag PP	Bagian Hukum Setda Usulan Prolegda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Presentase Peraturan Walikota yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Perwali yang ditetapkan}}{\text{Jumlah usulan Perwali yang masuk}} \times 100\%$	Sub bag PP	Register Perwali
3.	Terlaksananya peningkatan pengelolaan bahan dokumentasi dan penyebaran produk hukum	Presentase Produk hukum yang disebarluaskan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang disebarluaskan}}{\text{Jumlah semua produk hukum yang ditetapkan di tahun ini}} \times 100\%$	Sub bag Bantuan Hukum dan Dokumentasi	Bagian Hukum Setda
4.	Terlaksananya penanganan gugatan perkara dan pemberian bantuan pertimbangan hukum	Presentase gugatan perkara yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah gugatan perkara yang ditangani}}{\text{Jumlah gugatan perkara yang masuk}} \times 100\%$	Sub bag Bantuan Hukum dan Dokumentasi	Bagian Hukum Setda
5.	Meningkatnya pelayanan dan kerukunan kehidupan yang harmoni antar umat beragama	Jumlah konflik karena agama	Jumlah konflik agama pada tahun berkenaan	Sub Bagian APK Bagian Kesra	- Kelurahan - Kecamatan - Bakesbangpol & PBD - Satpol PP - Bagian Kesra
		Rasio tempat ibadah dibanding penduduk	jumlah tempat ibadah/Jumlah Penduduk x 100%	Sub Bagian APK Bagian Kesra	- Kelurahan - Bagian Kesra - Kantor Kemenag
		Prosentase lulusan SD yang beragama Islam	jumlah siswa lulusan SD yang beragama Islam bisa baca Alqur'an dan yang	Sub Bagian APK	- Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		bisa baca Alqur'an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain	mendapatkan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain/ Jumlah siswa SD keseluruhan x 100%	Bagian Kesra	- LPTQ Kota Blitar - Bagian Kesra - Kantor Kemenag
6.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	Prosentase jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin/ Jumlah penduduk x 100%	Sub Bagian Kesos Bagian Kesra	- BPS - Bappeda - Kecamatan - Kelurahan
7.	Meningkatnya peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan	Tingkat inflasi yang stabil dan terkendali	Inflasi di bawah dua digit (<5)	Kepala Bagian Perekonomian	BPS
		Peningkatan akses pemasaran produk unggulan Kota Blitar di pasar regional dan nasional	Jumlah keikutsertaan dalam pameran produk unggulan tingkat regional dan nasional	Kepala Bagian Perekonomian	Dinas Perindag, Dinas dan UKM, Dinas pertanian, Dinsosnaker, Bapemas
		Tersedianya data perubahan harga bahan kebutuhan pokok bulanan	Laporan perubahan harga kebutuhan pokok bulanan : Jumlah data perubahan harga dalam 1 tahun X 100%	Kepala Bagian Perekonomian	Dinas Perindag
		Kontribusi PAD yang bersumber dari BUMD	$\frac{\text{Kontribusi PAD BUMD}}{\text{Jumlah PAD Kota Blitar}} \times 100\%$	Kepala Bagian Perekonomian	PDAM, BPR Artha Praja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8.	Terwujudnya sinergisitas koordinasi antar SKPD untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik	Prosentase hasil pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan jadwal perencanaan	Jumlah paket pekerjaan yang selesai tepat waktu : jumlah paket pekerjaan x 100%	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Laporan Hasil Monev
9	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara lelang	=Jumlah Paket Lelang : Jumlah seluruh paket lelang dalam SIRUP	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Lpse.blitarkota.go.id Sirup.lkpp.go.id
10	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Persentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat	Jumlah surat yg dpt diproses sesuai tujuan/Jumlah Surat yang masuk x 100 %	Kepala Bagian Umum	Laporan Bulanan
		Persentase radiogram yang terdistribusi tepat waktu	Jumlah radiogram yg terdistribusi tepat waktu/Jumlah radiogram dalam satu bulan x 100%		Laporan Bulanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan dinas yg layak jalan dari segi administrasi dan fisik	Jumlah kendaraan dinas yg layak jalan dari segi administrasi dan fisik dalam 1 tahun	Kepala Bagian Umum	Laporan Bulanan
12	Meningkatnya Opini Positif terhadap Pemerintah Daerah	Persentase berita positif	Jumlah berita positif : Jumlah berita yang terpantau	Bagian Humas dan Protokol	Data dan kliping Media Tahun N
13	Terwujudnya manajemen pemerintah daerah yang akuntabel melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan efektifitas kerja aparatur	Prosentasi tupoksi yang telah sesuai dengan urusan kewenangan daerah	Jumlah tupoksi yang telah sesuai dengan urusan kewenangan daerah/Jumlah Tupoksi x100%	Kepala Bagian Ortala	Laporan Hasil evaluasi Tupoksi
		Prosentase SKPD yang telah melaksanakan standart pelayanan	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standart pelayanan / Jumlah SKPD x 100%	Kepala Bagian Ortala	Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan Standart Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
- II VISI : MEMBERDAYAKAN DAN MASYARAKAT KOTA BLITAR MENUJU KELUARGA SEJAHTERA
- III MISI :
1. Meningkatkan sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan keluarga sejahtera melalui keluarga berencana
3. Meningkatkan peran dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Menurunnya KDRT terhadap jumlah keluarga
5. Terselesainya pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak lainnya
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
POKOK pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

5. Penyelenggaraan tugas informasi pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan ;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Jumlah LPMK Aktif	Jumlah LPMK Aktif dibagi Jumlah LPMK se Kota Blitar	Kabid Pemberdayaan masyarakat	Laporan Pendataan
		Prosentase Jumlah Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan	Jumlah Perempuan Aktif Dalam Lembaga Pemerintah dibagi Jumlah Perempuan Keseluruhan di Kota Blitar dikalikan 100	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dispendukcapi 1
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Rasio Posyandu Balita Per RW	Jumlah Posyandu Balita dibagi Jumlah RW se Kota Blitar	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Laporan Kegiatan
		Rasio Posyandu Lansia per Kelurahan	Jumlah Posyandu Lansia dibagi Jumlah Kelurahan se Kota Blitar	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Laporan Kegiatan
3.	Menurunnya KDRT terhadap jumlah keluarga	Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga	Jumlah Kasus KDRT dibagi jumlah keluarga di Kota Blitar	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	KP2A dan POLRESTA Blitar Kota
4.	Kasus penyelesaian pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak	Rasio penyelesaian pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak	Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan dibagi jumlah kasus yang ada	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	KP2A dan POLRESTA Blitar Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pasangan usia Subur yang Mengikuti Program KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang Mengikuti KB dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur Di Kota Blitar Dikalikan 100	Kabid Keluarga Berencana	Laporan F/I/DAL
		Menurunnya Angka Kelahiran (TFR)	TFR = 5Σ ASFRI	Kabid Keluarga Berencana	Laporan Pendataan Keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS KOPERASI DAN UKM
- II VISI : Mewujudkan Koperasi Dan Umkm Yang Berkualitas Dan Berbasis Kompetensi Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
- III MISI :
1. Meningkatkan SDM koperasi dengan melalui penerapan standar kompetensi kerja ;
2. Meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan manajemen aplikatif ;
3. Mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi ;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja sumberdaya aparatur
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan profesionalisme SDM dan UMKM ;
2. Meningkatkan Skala Usaha Optimalisasi Pengelolaan Koperasi ;
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM ;
4. Membangun Citra Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan yang baik;
- V TUGAS : Menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangana Pemerintah Daerah di bidang Usaha Kecil Menengah
POKOK berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- VI FUNGSI :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{total jumlah koperasi}} \times 100\%$	Bidang kelembagaan	Data koperasi
2.	Meningkatnya kualitas usaha koperasi	Prosentase tingkat pengembalian permodalan	$\frac{\text{jumlah pengembalian}}{\text{jumlah pinjaman}} \times 100\%$	Bidang pemberdayaan koperasi	Data permodalan koperasi
3.	Meningkatnya kualitas kooperasi yang berdaya saing	Prosentase koperasi sehat	$\frac{\text{jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi}} \times 100\%$	Bidang pemberdayaan koperasi	Data koperasi
4.	Meningkatnya kontribusi UKM/UMKM terhadap PDRB	Prosentase kontribusi UMKM terhadap PDRB	$\frac{\text{jumlah kontribusi UMKM per sektor}}{\text{jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Bidang pemberdayaan UMKM	Data omzet UMKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- II VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
- III MISI : 1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Implementatif
2. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- IV TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Prinsip - Prinsip Kepemerintahan yang baik
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan POKOK statistic
- VI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
5. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
8. Penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
9. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan

ruang, penelitian dan pengembangan;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
11. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
13. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan ;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Prosentase SKPD yang kualitas perencanaannya baik	$\frac{\text{SKPD dengan kualitas perencanaan baik}}{\text{Seluruh SKPD}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Eksosbud, Bidang Perencanaan Praswil, Bidang Perencanaan Pemkesra, Bidang Data dan Pengendalian	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA-PPAS, Dokumen APBD, Dokumen Evaluasi program Pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- II VISI : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota Blitar yang Profesional Tahun 2015
- III MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
- IV TUJUAN :
1. Meningkatnya Disiplin Pegawai
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Perencanaan operasional program kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;
4. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;
5. Pengusulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;
6. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota;
7. Pengusulan penetapan NIP;
8. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
10. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

- ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
11. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 12. Penetapan dan pembinaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
 14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
 15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Disiplin Pegawai	Persentase Pegawai yang Disiplin	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang tidak melanggar Disiplin}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran disiplin
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Persentase Pejabat Struktural yang Lulus Diklat Kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah Pejabat struktural yang Lulus Diklatpim}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang ada}} \times 100\%$	Bidang Diklat	Rekapitulasi Data Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim dan Lulus
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Persentase Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Naik Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yg Naik Pangkat/ Gaji Berkala}} \times 100\%$	Bidang Formasi dan Mutasi	Rekapitulasi Data Pegawai yang Naik Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- II VISI : Menjadi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Akurat dan Valid Menuju Kemajuan KOTA BLITAR
- III MISI :
1. Mewujudkan Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai prinsip – prinsip penganggaran.
2. Mewujudkan Verifikasi Belanja dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Mewujudkan system Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi yang berbasis Akrual
4. Mewujudkan pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Informasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
5. Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- IV TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pengelola keuangan yang tertib dan taat peraturan perundang-undangan
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
4. Penyusunan pedoman teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;

6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Badan ;
9. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program kerja Badan;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan badan;
12. Pelayanan informasi dan publikasi keuangan daerah dan barang milik daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan daerah dan barang milik daerah;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan daerah dan barang milik daerah keuangan daerah dan barang milik daerah secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dan penetapan APBD serta perubahan APBD tepat waktu	Bidang Anggaran Bidang Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - SK Standar Harga/Standar satuan biaya - Nota Kesepakatan KUA/PPAS dan Raperda APBD - Pedoman Penyusunan RKA - Surat Pengiriman Raperda APBD ke Provinsi - Perda dan Perwal APBD - Pengesahan DPA
			Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran	Bidang Perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Verifikasi Pengajuan SPM - Dokumen SP2D
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Bidang PPK dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Keuangan Daerah - Surat Pengiriman Laporan Keuangan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai rencana kerja SKPD	Bidang Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan Barang Daerah - Dokumen investarisasi Barang Daerah
Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi melalui sistem informasi					
Legalitas kepemilikan dan pemanfaatan barang milik daerah					

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- II VISI : Terwujudnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Politik untuk menciptakan Ketertiban dan Ketentraman menuju masyarakat Madani tahun 2030.
- III MISI : Menumbuhkembangkan semangat Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Masyarakat Kota Blitar yang partisipatif, demokratis, tentram, terkendali dan beretika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- IV TUJUAN : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Kota Blitar yang kondusif.
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.
- POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana berdasar peraturan perundang-undangan ;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
 4. Penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana ;
 5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
 7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Blitar	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Sekretariat dan Seluruh Bidang	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		2. Jumlah Konflik SARA	Jumlah konflik yang bernuansa SARA	Bidang Kesatuan Bangsa	Laporan Kegiatan FKUB setiap semester / tahun
		3. Presentase Demonstrasi Penyaluran Aspirasi secara tertib	$\frac{\text{Jml. Penyaluran Partisipasi Demonstrasi yang tertib}}{\text{Jml. Seluruh Penyaluran Aspirasi Demonstrasi}} \times 100\%$	Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Laporan kegiatan setiap tahun
		4. Tingkat Partisipasi Politik	$\frac{\text{Jml. Pemilih yang hadir}}{\text{Jml. Pemilih Masuk DPT+tb}} \times 100\%$	Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Kegiatan Parpol setiap semester per tahun
		5. Presentase Kinerja baik bagi ormas terdaftar	$\frac{\text{Jml. Ormas terdaftar Kinerja baik}}{\text{Jml. Seluruh Ormas Kota Blitar}} \times 100\%$	Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Kegiatan Ormas setiap tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
- II VISI : Terwujudnya Kota Blitar yang bersih, indah dan hijau dengan menekankan pada pengelolaan Lingkungan Hidup yang partisipatif dan berkelanjutan pada Tahun 2021
- III MISI :
1. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah secara profesional berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan ruang terbuka hijau
4. Melaksanakan edukasi bidang lingkungan hidup yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan
2. Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan
3. Meningkatkan fungsi lingkungan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
6. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat partisipatif
- V TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan
POKOK
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup dan

Persampahan;

3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
4. Ppengkoordinasian penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup ;
6. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang persampahan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota ;
8. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan ;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan; dan

19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya upaya pemantauan kualitas air dan udara serta usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persyaratan pengelolaan lingkungan	Prosentase pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Lingkungan	Laporan pengaduan dugaan pencemaran
		Jumlah usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan	Jumlah usaha yang memiliki dokumen baku mutu lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Data usaha yang memiliki dokumen
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Prosentase sampah yang terangkut	$\frac{\text{Volume sampah terangkut}}{\text{Volume sampah total}} \times 100\%$	Bidang Persampahan	Volume sampah terangkut
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau	Prosentase RTH publik	$\frac{\text{Luas RTH publik}}{\text{Luas total}} \times 100\%$	Bidang Pertamanan	Luasan RTH publik
4.	Meningkatnya akses informasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Predikat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan <ul style="list-style-type: none"> • ADIPURA • ADIWIYATA • KELURAHAN BERSERI 	Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan	Penghargaan yang diperoleh

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN
- II VISI : Terwujudnya Pendidikan Di Kota Blitar Yang Terjangkau, Murah, Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya Saing Tinggi
- III MISI :
 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
 2. Meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing tinggi
 3. Meningkatkan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan pada tiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal
 4. Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta lembaga Pendidikan
 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pembelajaran yang memadai
 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kota Blitar secara sadar dan sukarela
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan Menengah
 2. Meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan dan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan, lembaga pendidikan luar sekolah di Kota Blitar
 3. Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan pada tiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal
 4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP/SMA/ SMK
 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran pada tiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal
 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

POKOK

- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan
 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	APK PAUD (3 - 6 tahun)	$\frac{\text{Jumlah murid keseluruhan PAUD pada usia 3 - 6 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 3 - 6 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD, Sekretariat	Profil pendidikan
		APK SD/MI/SDLB/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan SD/MI/SDLB/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF, PAUD dan Bidang Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan SMP/MTs/SMPLB/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		APK SMA/MA/SMALB/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikmen, sekretariat	Profil pendidikan
		APM SD/MI/SDLB/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16 - 18 tahun jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16 - 18 tahun jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas,	Profil pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Sekretariat	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa (SD/MI) putus sekolah}}{\text{Jumlah total siswa (SD/MI)}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/Mts	$\frac{\text{Jumlah siswa (SMP/MTs) putus sekolah}}{\text{Jumlah total siswa (SMP/MTs)}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa (SMA/SMK/MA) putus sekolah}}{\text{Jumlah total siswa (SMA/SMK/MA)}} \times 100\%$	Bidang PNF & PAUD dan Bidang, Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Angka kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Angka kelulusan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Angka kelulusan SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang dikmen , Sekretariat	Profil pendidikan
		Rasio Kelas Murid : SD	Rasio Jumlah kelas dengan murid SD	Bidang Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan
		Rasio Kelas Murid : SMP	Rasio Jumlah Kelas dengan murid SMP	Bidang Dikdas, Sekretariat	Profil pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Rasio Kelas Murid : SMA/SMK	Rasio Jumlah Kelas dengan murid SMA/SMK	Bidang dikmen , Sekretariat	Profil pendidikan
		Rasio Guru - Murid : SD	Rasio Jumlah guru dengan murid SD	Bidang Dikdas, PTK, Sekretariat	Profil pendidikan
		Rasio Guru - Murid : SMP	Rasio Jumlah guru dengan murid SMP	Bidang Dikdas, PTK, Sekretariat	Profil pendidikan
		Rasio Guru - Murid : SMA/SMK	Rasio Jumlah guru dengan murid SMA/SMK	Bidang Dikmen, PTK, Sekretariat	Profil pendidikan
		Rata - rata nilai ujian nasional: SD, SMP, SLTA	$\frac{\text{Akumulasi rata - rata nilai ujian di tiap sekolah}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	Bidang Dikdas dan Dikmen	Profil pendidikan
		Persentase guru berkualifikasi akademik sesuai dengan peraturan perundangan dan berkompentensi	$\frac{\text{Jumlah seluruh guru berkualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah seluruh guru di kota Blitar}} \times 100\%$	Bidang PTK	Profil pendidikan
		Persentase guru yang berkompentensi/ berkinerja amat baik	$\frac{\text{Jumlah seluruhguru berkompentensi/ berkinerja amat baik}}{\text{Jumlah seluruh guru di Kota Blitar}} \times 100\%$	Bidang PTK	Profil pendidikan
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata - rata lama sekolah (tahun)	$\frac{\text{Jumlah seluruhTahun Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}}$	Sekretariat, dikdas, dikmen	Profil pendidikan
		angka melek huruf usia 15 – 24	$\frac{\text{Jumlah penduduk melek huruf usia 15 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk yang buta huruf seluruhnya}}$	PNF dan PAUD	Profil pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
- II VISI : Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Beretos kerja Tinggi, Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tenaga Kerja yang Produktif, Kreatif, Inovatif serta Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif
- III MISI :
1. Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur
2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja
4. Mengembangkan system hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
- IV TUJUAN :
1. Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Aparatur serta meningkatkan tertib administrasi
2. Meningkatkan kemampuan social ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS serta Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)
3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja, produktifitas kerja, serta perluasan kesempatan kerja
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- VI FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian berdasarkan peraturan perundang-

undangan ;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan Daerah ;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	(%) PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya mendapat bantuan}} \times 100\%$	Bidang Sosial	Hasil Monev
2.	Meningkatnya Kualitas pencari Kerja	% peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja	Hasil Monev
		% pencaker terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencaker yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja	Hasil Monev
3.	Meningkatnya kesadaran hukum perusahaan di bidang ketenagakerjaan	% perusahaan taat aturan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan taat aturan ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$ <p><u>Kriteria perusahaan taat hukum ketenagakerjaan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2. Menerapkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Menerapkan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 4. Karyawan/pekerja diikutkan kepesertaan BPJS 5. Menerapkan UMK 	Bidang Pengawasan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial	Hasil Monev

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : DINAS PENDAPATAN
- II VISI : Terwujudnya peningkatan Pendapatan daerah secara transparan dan berkualitas dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan
- III MISI :
1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi PAD dan pendapatan daerah lainnya secara obyektif dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan Daerah
3. Meningkatkan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan daerah
4. Meningkatkan kapasitas organisasi melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
- IV TUJUAN :
1. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang didukung dengan TI yang memadai
- V TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- POKOK
- VI FUNGSI :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
7. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

8. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pendapatan;
14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pendapatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan realisasi pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD th n} - \text{realisasi PAD th n} - 1}{\text{Realisasi PAD th n} - 1} \times 100\%$	Bidang Pembukuan	Data PAD
2.	Peningkatan data potensi obyek sumber-sumber pendapatan daerah	Prosentase data potensi sumber obyek pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah obyek}}{\text{Potensi subyek atau obyek pajak daerah}} \times 100\%$	Bidang Pajak	Data potensi obyek sumber pendapatan daerah
		Prosentase data potensi sumber obyek retribusi daerah	$\frac{\text{Jumlah obyek}}{\text{Potensi subyek atau obyek retribusi daerah}} \times 100\%$	Bidang retribusi	
3.	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD)	Prosentase penyajian laporan pendapatan asli daerah tepat waktu	$\frac{\text{Laporan PAD yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Laporan PAD}} \times 100\%$	Bidang pembukuan	Penyajian laporan PAD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- II VISI : Mewujudkan Daya Dukung Administratif Dan Pelayanan Yang Prima Bagi Kinerja DPRD Kota Blitar Pada Tahun 2015
- III MISI :
 1. Memberikan daya dukung sistem administrasi serta sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kinerja aparatur
 2. Mewujudkan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
 3. Mewujudkan dukungan Sumber Daya Manusia yang proaktif untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang Pro Rakyat
- IV TUJUAN :
 1. Meningkatkan kedisiplinan aparatur sekretariat DPRD dalam menajalankan tugas dan fungsinya
 2. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan
 3. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana sekaligus optimalisasi pemanfaatannya
 4. Meningkatkan kompetensi, daya tanggap dan profesionalisme aparatur
 5. Memberikan ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 6. Memberikan ketepatan informasi data serta pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
 7. Memberikan dukungan sumber daya manusia yang proaktif dalam rangka menampung aspirasi masyarakat
 8. Mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi
- V TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

- VI FUNGSI :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
 15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya	Prosentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi dalam mendukung kinerja DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi : $\frac{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Umum	Administrasi perkantoran dan sarpras
2.	Fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase pencapaian Prolegda	Jumlah prolegda yang ditetapkan : jumlah Prolegda x 100 %	Bagian Persidangan	Prolegda
3.	Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD	Prosentase usulan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah usulan yang ditindak lanjuti dalam pokok pikiran : Jumlah usulan masyarakat yang masuk x 100%	Bagian Humas dan Protokol	Laporan Reses Anggota DPRD dan laporan hasil hearing

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- I INSTANSI : KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN
- II VISI : Menuju Masyarakat Yang Cerdas, Sejahtera Dan Madani
- III MISI :
 1. Terbebasnya masyarakat dari buta aksara dan semua anak usia 7-15 tahun mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berbasis Iptek dan Imtaq;
 2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan non formal berbasis kompetensi;
 3. Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang murah dan terjangkau;
 4. Perluasan kesempatan berusaha bagi usaha mikro dan usaha rumah tangga;
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pembangunan;
 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulial, berbudaya dan Taat Hukum;
 7. Terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
 8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya local
 9. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.
- IV TUJUAN :
 1. Mewujudkan masyarakat yang bebas buta aksara ;
 2. Mewujudkan Pendidikan dan Pelatihan non formal yang berbasis kompetensi ;
 3. Mewujudkan perluasan akses masyarakat miskin terhadap
 4. Mewujudkan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha mikro dan usuha rumah tangga
 5. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kebijakan pembangunan
 6. Mewujudkan kualitas SDM yang handal, berakhlak mulia dan taat hokum
 7. Mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik
 8. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan seni budaya local

9. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman

V TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan POKOK pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

VI FUNGSI :

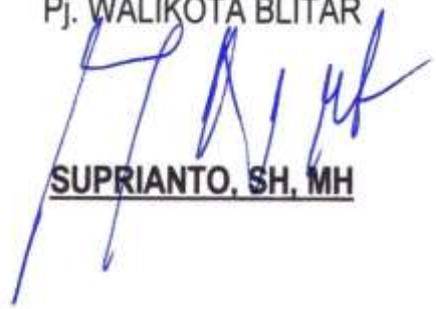
1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
6. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	Survey IKM	Nilai IKM (indeks kepuasan masyarakat)	Lurah	Laporan hasil survey IKM
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase RW yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang tepat waktu}}{\text{Jumlah RW yang melaksanakan musrenbang}} \times 100\%$	Lurah	Laporan hasil Musrenbang
		Prosesntase usulan RW yang menjadi prioritas	$\frac{\text{Jumlah usulan RW yang menjadi prioritas}}{\text{Jumlah seluruh usulan RW}} \times 100\%$	Lurah	Laporan hasil Musrenbang

Pj. WALIKOTA BLITAR


SUPRIANTO, SH, MH

